

**PARIWISATA HALAL:
POTENSI DAN PROSPEK**

PARIWISATA HALAL: POTENSI DAN PROSPEK

OLEH:

DEWI WURYANDANI

NIKEN PARAMITA PURWANTO

SAHAT ADITUA FANDHITYA SILALAH

HILMA MEILANI

DEWI RESTU MANGESWURI

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2020

Judul:
Pariwisata Halal: Potensi dan Prospek

Oleh:
Dewi Wuryandani; Niken Paramita Purwanto;
Sahat Aditua Fandhitya Silalahi; Hilma Meilani;
Dewi Restu Mangeswuri

xxii + 116 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-623-321-042-3

Copyrights © 2020
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan
Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Cetakan pertama: Desember 2020
YOI: 1939.38.196.2020
Desain sampul: Masugeng

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jln. Plaju No. 10, Jakarta 10230
Telepon: +62 (0)21-31926978, 31920114
Faksimile: +62 (0)21-31924488
Email: yayasan_obor@cbn.net.id
Website: www.obor.or.id

KATA PENGANTAR

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kunci penguatan ekonomi Indonesia, khususnya dari sisi penerimaan devisa, adalah peningkatan sektor pariwisata. Buku dengan judul *Pariwisata Halal: Potensi dan Prospek* ini sangat sesuai dengan dinamika saat ini di mana Indonesia pada tahun 2019 terpilih sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia bersama dengan Malaysia, dan minat terhadap pariwisata halal semakin meningkat. Saya menilai buku ini relevan dengan kondisi saat ini, bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan negara kepulauan terbesar sehingga pariwisata halal potensial untuk dikembangkan di Indonesia.

Buku ini mengulas secara umum mengenai potensi dan prospek pariwisata halal, mulai dari posisi Indonesia dalam dinamika pengembangan pariwisata halal global, di mana Indonesia dapat menjadi pusat pariwisata halal pada skala global karena didukung dengan keragaman kekayaan serta keindahan alam, berpenduduk dominan muslim dengan keragaman budaya yang diwarnai oleh nilai-nilai Islami, sampai dengan potensi dan perkembangan pariwisata halal nasional di mana Indonesia telah meraih penghargaan “*World’s Best Halal Travel Destination*” versi GMTI 2019. Selain itu juga dipaparkan mengenai strategi menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata halal dunia. Beberapa opsi strategi pengembangan ditawarkan, salah satunya adalah pendekatan *smart tourism*. Setelah pembahasan yang bersifat nasional, buku ini juga memberikan contoh potensi, perkembangan, dan strategi pengembangan pariwisata halal di dua

daerah, yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Karangasem, mengenai kesiapan pemerintah daerah (pemda) dalam mengembangkan pariwisata halal.

Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 memberi dampak besar bagi sektor pariwisata di dunia, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis dalam kunjungan wisatawan di Indonesia, dan prospek pengembangan pariwisata halal di tahun-tahun mendatang turut terganggu akibat pandemi Covid-19. Industri pariwisata nasional, termasuk di dalamnya pariwisata halal, diharapkan dapat bangkit kembali, oleh karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan para pelaku pariwisata untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, disertai dukungan perilaku masyarakat yang sesuai dengan adaptasi kebiasaan di era *new normal*.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan selamat kepada para peneliti yang telah menghasilkan karya tulis ilmiah (KTI) yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman mengenai potensi dan prospek pariwisata halal. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Prof. Achmad Suryana yang telah meluangkan tenaga dan waktunya dalam merancang tema, *outline* KTI, dan kegiatan editorial lainnya, sehingga buku ini layak untuk diterbitkan. Semoga yang tersaji dalam buku ini dapat mendorong pengembangan pariwisata halal di Indonesia.

Jakarta, September 2020
Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI
Dr. Indra Pahlevi, S.IP, M.Si.

PROLOG

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam sistem perekonomian nasional dan dunia. Statista (2020), yang menyajikan statistik dan fakta tentang pariwisata global, mencatat selama 10 tahun terakhir (2009-2019) sumbangan total dari industri perjalanan (*travel*) dan pariwisata (*tourism*) terhadap produk domestik bruto (PDB) global sekitar 10% dan sumbangan langsungnya sekitar 3%. Informasi dari *United Nations-World Tourism Organization* (UNWTO) yang dirilis Januari 2020, memperlihatkan jumlah kedatangan wisatawan internasional secara global pada tahun 2019 tumbuh 3,8% dari tahun sebelumnya dengan total kunjungan mencapai 1,5 miliar orang.

Pesatnya perkembangan pariwisata global tidak terlepas dari naiknya kunjungan wisatawan dari negara-negara muslim yang pendapatan per kapita penduduknya tumbuh cukup tinggi, terutama dari negara-negara di Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia. *Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index* (GMTI) memperkirakan bahwa tahun 2026 kontribusi sektor pariwisata halal terhadap ekonomi global melonjak tinggi (sekitar 35%) dengan nilai sebesar 300 miliar dolar Amerika Serikat (USD) dibandingkan dengan perkiraan kontribusi tahun 2020 sebesar US\$220 miliar. Pada saat itu kunjungan wisatawan muslim secara global diperkirakan mencapai 230 juta pengunjung atau lebih dari 10% dari total keseluruhan wisatawan global. Perkiraan ini dibuat tahun 2019 sebelum terjadi pandemi Covid-19 yang mengguncang perekonomian global. Tentu saja perkiraan ini tidak lagi valid lagi, namun di dalam perkiraan

tersebut terkandung gambaran optimis akan cerah prospek pariwisata halal di masa datang.

Semua negara, termasuk negara nonmuslim yang memiliki potensi besar industri pariwisata memandang peningkatan wisatawan dari negara-negara muslim ini menjadi peluang bisnis yang memiliki prospek sangat baik. Sebagai contoh, untuk menarik minat wisatawan Indonesia ke Korea Selatan, *Korea Tourism Organization (KTO)* Jakarta meluncurkan buku panduan yang menyajikan informasi dan tips berwisata bagi wisatawan muslim, antara lain mengenai masjid-masjid besar dan bersejarah di negara ini yang dijadikan objek wisata dan juga dapat dimanfaatkan untuk menunaikan ibadah sholat.

Menurut KTO, Korea dengan penduduk beragama Islam hanya 0,2% merespons adanya peningkatan kunjungan wisatawan muslim di Korea dengan mengembangkan berbagai fasilitas dan layanan bagi wisatawan muslim. Negara ini mengembangkan lembaga, infrastruktur, pelayanan, serta beragam industri pendukung pariwisata yang ramah muslim, atau lebih dikenal dengan istilah *moslem friendly*. Restoran yang menyajikan makanan halal semakin banyak dan mudah dijumpai. Untuk menarik jumlah wisatawan muslim, pada tahun 2019 KTO menggelar "*Halal Restaurant Week Korea*" yang keempat selama dua bulan penuh pada September dan Oktober .

Sementara itu, Thailand yang penduduknya dominan beragama Budha, telah menjadi destinasi wisata yang populer bagi umat muslim, terutama dari Indonesia yang mencari liburan relatif murah namun *moslem friendly*. Pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 3,6 juta wisatawan muslim (hampir 10% dari pengunjung) datang ke Thailand. Dengan pasar yang cukup menjanjikan, Kementerian Pariwisata dan Olah Raga Thailand meluncurkan sebuah proyek untuk pengembangan pariwisata halal di negaranya (<https://www.bangkokpost.com/business>, 17 Juni 2019).

Sama halnya dengan di tingkat global, kontribusi industri pariwisata Indonesia terhadap perekonomian nasional cukup signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sumbangan sektor pariwisata terhadap PDB pada tahun 2010 sebesar 2,05%, lalu melonjak menjadi 4,25% di tahun 2015, dan meningkat lagi menjadi 4,80% pada tahun 2019. Peningkatan tersebut didorong oleh investasi di sektor pariwisata termasuk penunjangnya, seperti perbaikan sarana transportasi dan pengembangan fasilitas layanan wisata guna merespons meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan Nusantara (wisnus).

Dengan perspektif perkembangan pariwisata global yang cerah dan juga peningkatan pendapatan per kapita penduduk Indonesia, pemerintah optimis sektor pariwisata dapat terus meningkat sumbangannya terhadap PDB dan penciptaan kesempatan kerja. Dalam Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Pariwisata 2020-2024 (yang disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebelum pandemi Covid-19 terjadi), target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB pada tahun 2024 sebesar 5,5%, nilai devisa USD32 miliar, dan jumlah tenaga kerja pariwisata sebanyak 21 juta orang. Jumlah wisman ditargetkan naik dari 18 juta kunjungan di tahun 2020 menjadi 24 juta kunjungan di tahun 2024. Sementara itu sasaran jumlah wisnus sebanyak 312 juta perjalanan di tahun 2020 menjadi 350 juta sampai 400 juta perjalanan di tahun 2024.

Salah satu program untuk mencapai sasaran tersebut adalah pengembangan pariwisata halal. Wisata halal mempertimbangkan nilai-nilai dasar Islam dalam penyajian jasa dan pelayanan wisata, mulai dari akomodasi, restoran, hingga aktivitas wisata yang sepenuhnya mengacu pada norma-norma ke-Islam-an. Upaya untuk membangun pariwisata halal di Indonesia mestinya tidak terlalu sulit karena kondisi lingkungan dan budaya yang mendukung, fasilitas beribadah tersedia dan terbuka untuk umum di berbagai tempat sepanjang perjalanan

wisata, dan penerimaan masyarakat secara umum terhadap kegiatan pariwisata yang berprinsip syariah juga positif.

Sejak dicanangkannya oleh pemerintah tahun 2014, daya saing pariwisata halal Indonesia meningkat terus. Berdasarkan peringkat *Global Muslim Tourism Index (GMTI)* 2019 pariwisata halal Indonesia mencapai peringkat terbaik dunia. Kementerian Pariwisata memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan posisi industri pariwisata halal di Indonesia menjadi tujuan utama wisata halal global. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata halal yang tersebar di berbagai daerah. Pada tahun 2019 Kementerian Pariwisata mencatat bahwa terdapat 13 provinsi yang siap untuk menjadi destinasi wisata halal yaitu Provinsi Aceh, Banten, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.

Pengembangan pariwisata halal dapat dijadikan pemacu dan pemicu pengembangan perekonomian daerah mengingat lokasi destinasi, fasilitas wisata, dan akar budaya sebagai modal dasar pariwisata berada di daerah. Kelompok peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tahun 2019 melaksanakan penelitian tentang potensi dan strategi pengembangan pariwisata halal untuk mendorong perekonomian daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dan disertai dengan telaahan kepustakaan dan referensi lainnya, termasuk permasalahan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap industri pariwisata, disusun buku berjudul *Pariwisata Halal: Potensi dan Prospek*.

Buku ini memuat lima bagian dengan fokus pada pembahasan tentang pengembangan wisata halal. Bagian pertama ditulis oleh *Dewi Wuryandani* menyajikan pembahasan tentang posisi Indonesia dalam dinamika pengembangan pariwisata halal global. Tulisan ini

menegaskan Indonesia dapat menjadi pusat pariwisata halal pada skala global karena didukung dengan keragaman kekayaan serta keindahan alam, berpenduduk dominan muslim dengan keragaman budaya yang diwarnai oleh nilai-nilai Islami. Namun untuk mewujudkannya, terdapat paling tidak dua tantangan, yaitu adanya pola pikir (*mindset*) masyarakat terhadap pariwisata muslim yang belum seluruhnya kondusif dan masih lemahnya regulasi spesifik yang menaungi pariwisata halal, baik dalam bentuk Undang-Undang (UU) maupun peraturan perundangan di bawahnya.

Potensi dan perkembangan pariwisata halal nasional dibahas di bagian kedua yang ditulis oleh *Niken Paramita Purwanto*. Penulis menyampaikan bahwa Indonesia telah meraih penghargaan “*World’s Best Halal Travel Destination*” versi GMTI 2019. Capaian ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dengan modal dasar kekayaan dan keragaman alam dan budaya, pengembangan pariwisata halal nasional memiliki prospek sangat baik, namun perlu disertai dengan pengembangan destinasi wisata yang *moslem friendly* dan ramah keluarga, layanan dan fasilitas yang ramah muslim, dan pola pikir masyarakat yang sadar halal.

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi menyusun tulisan bagian ketiga mengenai strategi menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata halal dunia. Beberapa opsi strategi pengembangan ditawarkan, salah satunya adalah pendekatan *smart tourism*. Pendekatan *smart tourism* mengandalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan fokus pada pelibatan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata halal. Untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat, pendekatan *smart tourism* perlu diimplementasikan secara terintegrasi dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal, sehingga penggunaan teknologi tidak akan mengurangi nilai-nilai budaya asli suatu daerah dan dapat memberikan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Dua bagian tulisan berikutnya memfokuskan pada pembahasan potensi, perkembangan, dan strategi wisata halal daerah. Bagian keempat disusun oleh *Hilma Meilani*, membahas wisata halal di daerah mayoritas muslim dengan mengambil kasus Kota Yogyakarta. Kota ini sudah menjadi destinasi pariwisata halal cukup favorit, karena memiliki lingkungan yang bersifat *moslem friendly*. Dari aspek amenities, walaupun belum ada hotel yang secara resmi telah bersertifikasi syariah, namun hampir semua hotel di Kota Yogyakarta telah menyediakan produk makanan halal. Jumlah masjid sebagai tempat ibadah umat Islam cukup memadai dan tersebar di berbagai sudut Kota Yogyakarta, yang dapat dimanfaatkan dalam perjalanan wisata. Untuk pengembangan wisata halal selanjutnya, salah satu kebijakan yang perlu dimiliki kota ini adalah peraturan daerah untuk penguatan bisnis wisata halal.

Pada bagian kelima, *Dewi Restu Mangeswuri* mengulas tentang wisata halal daerah untuk kasus daerah mayoritas nonmuslim, yaitu di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Di tengah kemajuan pariwisata Bali yang terkenal mendunia dan mayoritas penduduknya beragama Hindu Bali, terselip satu lokasi wisata muslim. Objek wisata Kampung Muslim Kecancang berada di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, merupakan kampung Islam terbesar di Kabupaten Karangasem. Namun, pada saat ini Karangasem dinilai belum sepenuhnya siap untuk mengembangkan wisata halal karena fasilitas dan sarana pendukung wisata halal di kabupaten ini belum memadai. Belum ada hotel yang bersertifikasi syariah dan baru ada satu restoran yang mendapat sertifikasi halal. Untuk mewujudkan wisata halal di kabupaten ini perlu didukung oleh peraturan tentang pengembangan kepariwisataan dari pemerintah kabupaten, pengembangan sarana dan prasarana wisata yang *moslem friendly*, dan dukungan masyarakat sekitar destinasi wisata atas kegiatan wisata halal di daerahnya.

Buku ini menyajikan pembahasan mengenai prospek cerah bagi pariwisata halal nasional untuk bertransformasi menjadi salah satu destinasi pariwisata halal global yang unggul. Harapan optimis tersebut dikemukakan di buku ini yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan tahun 2019, pada saat ekonomi nasional dalam periode lima tahun sebelumnya tumbuh di atas 5%/tahun. Namun mulai awal Januari 2020 muncul wabah penyakit yang disebabkan virus novel corona yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, kemudian menyebar cepat ke seluruh negara di dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) menyatakan kejadian ini sebagai pandemi (wabah mendunia), yang kemudian diberi nama Covid-19. Di Indonesia, kasus penderita penyakit Covid-19 pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat, yang kemudian menyebar dengan cepat ke wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia.

Dalam upaya menghentikan penyebaran lebih lanjut wabah penyakit tersebut, semua negara di dunia membatasi secara ketat pergerakan transportasi, barang, dan manusia, bahkan ada negara yang menutup sebagian wilayahnya baik keluar atau masuk (*lockdown*). Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan ketat pergerakan transportasi dan manusia yang disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dampak pandemi Covid-19 yang diikuti dengan kebijakan restriksi ketat pergerakan tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara melambat. Yang paling terpuak akibat pandemi ini adalah kegiatan ekspor dan pariwisata, sehingga prediksi pertumbuhan optimis pariwisata halal global dan juga nasional pada tahun 2020 dan selanjutnya perlu dikoreksi.

Bank Dunia (*the World Bank*, Juni 2020) menyatakan ekonomi global memasuki masa resesi terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Mengutip dari *Bloomberg and Trading Economics*, Kementerian Keuangan menyajikan angka-angka pertumbuhan ekonomi negatif

untuk kuartal II 2020 terhadap kuartal I 2019 (*year on year/yoy*) di berbagai negara. Pertumbuhan negatif tersebut dialami oleh Amerika Serikat -9,5% dan Uni Eropa -14,4%; demikian juga hampir semua negara di Asia mengalami kontraksi, yaitu Singapura -13,2%, Filipina -16,5%, dan Korea Selatan -2,9% (*Press Conference RAPBN 2021, 14 Agustus 2021*). Bank Sentral Malaysia juga melaporkan (14 Agustus 2020) bahwa pada periode yang sama, Malaysia mengalami kontraksi ekonomi cukup parah, yaitu mencapai -17,1%.

Indonesia juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. BPS melaporkan terjadi pertumbuhan PDB negatif pada triwulan II 2020 terhadap triwulan II 2019 (*yoy*) sebesar -5,32%. Pada periode tersebut lapangan usaha yang mendukung sektor pariwisata mengalami kontraksi (tumbuh negatif) sangat besar, yaitu akomodasi dan makan-minum -30,84% serta transportasi dan pergudangan -22,02%. Dengan demikian sudah dapat diperkirakan industri pariwisata Indonesia mengalami kontraksi yang sangat besar pula.

Kenyataan ini tidak harus memupus harapan pada peran penting sektor pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi nasional di masa datang. Kementerian Keuangan menyatakan pemulihan ekonomi dunia dan nasional diperkirakan dipengaruhi oleh ketersediaan vaksin Covid-19 secara global dan nasional, yang diharapkan mulai tersedia pada tahun 2021. Dibarengi dengan terbangunnya perilaku masyarakat pada era *new normal* (normal baru) atau adaptasi kebiasaan baru, diharapkan ekonomi nasional dapat bangkit kembali, termasuk industri pariwisata yang di dalamnya terdapat kegiatan pariwisata halal. Dengan demikian, para pemangku kepentingan pembangunan pariwisata tetap harus memelihara semangat untuk berinvestasi guna pengembangan pariwisata halal.

Para penulis telah mengulas dampak dari guncangan (*shock*) yang mendunia yang diakibatkan pandemi Covid-19 bagi perkembangan sektor pariwisata nasional, termasuk pariwisata

Prolog

halal. Pada saat ini, yaitu saat pandemi masih berlangsung dan belum diketahui kapan berakhir, upaya mempersiapkan diri tetap diperlukan, antara lain berupa penyiapan peraturan-perundangan, baik di tingkat nasional maupun daerah guna menciptakan kondisi kondusif bagi pengembangan pariwisata halal di era normal baru.

Jakarta, September 2020

Editor

Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Prolog	vii
Daftar Isi	xvi
Daftar Tabel	xix
Daftar Grafik/Gambar	xxi

Bagian Pertama

Posisi Indonesia dalam Pengembangan Pariwisata Halal Global

<i>Dewi Wuryandani</i>	1
I. Pendahuluan	1
II. Pengertian, Konsep, dan Prinsip Wisata Halal	3
III. Pariwisata Halal di Indonesia	6
IV. Tantangan dalam Mengembangkan Pariwisata Halal Global	9
V. Posisi Pariwisata Halal Indonesia Saat Ini	12
VI. Penutup	15

Bagian Kedua

Potensi dan Perkembangan Pariwisata Halal Nasional

<i>Niken Paramita Purwanto</i>	19
I Pendahuluan	19
II Potensi Pariwisata Halal Nasional	20
III Perkembangan Pariwisata Halal	24
IV Kegiatan Pengembangan Wisata Halal	29
V Penutup	31

Bagian Ketiga

Strategi Menjadikan Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal Dunia

<i>Sahat Aditua Fandhitya Silalahi</i>	35
I Pendahuluan	35
II Konsep Wisata Konvensional, Syariah, dan Halal	37
III Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia	41
IV Indonesia dalam Perspektif sebagai Pusat Pariwisata Halal Dunia	43
V Konsep <i>Smart Tourism</i> dalam Pariwisata Halal	46
VI Penutup	49

Bagian Keempat

Potensi, Perkembangan dan Strategi Wisata Halal Daerah: Kasus Daerah Mayoritas Muslim di Kota Yogyakarta

<i>Hilma Meilani</i>	53
I Pendahuluan	53
II Potensi dan Perkembangan Pariwisata Halal Kota Yogyakarta	56
III Strategi Pemda dalam Pengembangan Pariwisata Halal	69
IV Penutup	74

Bagian Kelima

Potensi, Perkembangan dan Strategi Wisata Halal Daerah: Kasus Daerah Mayoritas Nonmuslim di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali

<i>Dewi Restu Mangeswuri</i>	79
I Pendahuluan	79

II	Potensi dan Perkembangan Pariwisata Halal Kabupaten Karangasem	80
III	Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Bali dan Karangasem	92
IV	Penutup	98
	Epilog	103
	Indeks	107
	Tentang Penulis	111
	Tentang Editor	115

DAFTAR TABEL

BAGIAN PERTAMA

Tabel 1.	Capaian Pariwisata Indonesia dalam Pemeringkatan Global dan Jumlah Kunjungan Wisatawan (Juta), Tahun 2015-2018	7
Tabel 2.	Kriteria Umum Pariwisata Halal	8

BAGIAN KEDUA

Tabel 1.	Peringkat 10 Besar Tujuan Wisata Muslim dari Negara-negara OKI dan Non OKI, Tahun 2018	22
Tabel 2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Pintu Masuk, Tahun 2018	25
Tabel 3.	Provinsi di Indonesia Peringkat 10 Besar IMTI 2019	26

BAGIAN KETIGA

Tabel 1.	Perbandingan Pariwisata Konvensional, Religi, dan Syariah/Halal	40
----------	--	----

BAGIAN KEEMPAT

Tabel 1.	Perbandingan Skor Yogyakarta dalam IMTI 2018 dan 2019	55
Tabel 2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Yogyakarta, 2014-2018	58
Tabel 3.	Potensi Daya Tarik Wisata dan Kunjungan Wisatawan di Kota Yogyakarta, 2018	60
Tabel 4.	Hotel, Akomodasi, dan Kapasitas Kamar di Kota Yogyakarta, 2013-2017	63
Tabel 5.	Jumlah Wisatawan dan Lamanya Menginap di Kota Yogyakarta, 2014-2018	63

Tabel 6.	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta, 2014-2017	66
Tabel 7.	Peringkat Sepuluh Besar Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung di Yogyakarta, 2017-2018	69

BAGIAN KELIMA

Tabel 1.	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Bali, Tahun 2014-2018	81
Tabel 2.	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Karangasem, Tahun 2013-2018	82
Tabel 3.	Potensi Daya Tarik Wisata dan Kunjungan Wisatawan di Karangasem 2018	83
Tabel 4.	Jumlah Hotel, Rumah Makan, dan Jumlah Produk Halal di Bali, Tahun 2014-2018	86
Tabel 5.	Nama Hotel dengan Restoran Bersertifikasi Halal MUI di Provinsi Bali, 2018	86
Tabel 6.	Jumlah Sarana Angkutan di Kabupaten Karangasem, 2017	88
Tabel 7.	Asal Negara dan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Bali, 2018	90

DAFTAR GAMBAR

BAGIAN KELIMA

Gambar 1.	Persentase 10 Besar Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Bali, 2018	91
-----------	--	----

EPILOG

Buku Bunga Rampai *Pariwisata Halal: Potensi dan Prospek* ini membahas konsep, pengertian, dan perkembangan wisata halal lingkup global dan nasional; potensi pengembangan pariwisata halal nasional; dan strategi serta kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata halal yang mampu mendukung pengembangan perekonomian daerah dan nasional. Buku ini diharapkan dapat menjelaskan potensi pengembangan pariwisata halal nasional dan di daerah, dan memberikan tambahan informasi bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan pengembangan pariwisata halal untuk mendorong perekonomian nasional dan daerah.

Dari lima bagian yang disajikan dalam buku ini, diketahui paling tidak empat permasalahan yang harus ditangani dalam pengembangan pariwisata halal nasional dan daerah, seperti diringkaskan sebagai berikut.

Pertama, belum ada regulasi yang mengatur secara komprehensif tentang wisata halal. Pada saat ini kegiatan pariwisata halal masih mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengatur kepariwisataan secara umum, belum mengatur pariwisata halal. Keberadaan regulasi spesifik yang menaungi pengembangan usaha pariwisata halal menjadi pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan, baik dalam bentuk Undang-Undang (UU) maupun peraturan perundangan di bawahnya, serta peraturan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki potensi wisata halal.

Kedua, perlunya membenahi fasilitas layanan untuk kegiatan pariwisata halal. Fasilitas hotel, restoran, tempat rekreasi, dan

pengaturan jadwal wisata selayaknya dirancang sesuai dengan kaidah syariah yang dapat membuat nyaman wisatawan muslim. Memperbanyak jumlah hotel yang bersertifikat syariah dan restoran yang memiliki sertifikat halal merupakan langkah pertama yang sangat penting.

Ketiga, perlunya secara berkelanjutan membangun *mindset* atau pola pikir para pengusaha pariwisata dan masyarakat di sekitar destinasi wisata yang positif terhadap pariwisata halal. Kegiatan pariwisata halal, apabila dilakukan dengan tepat dapat meningkatkan perekonomian daerah dan nasional, dengan tetap memelihara suasana nyaman baik bagi wisatawan muslim maupun masyarakat di sekitar lokasi wisata,

Keempat, pemasaran dan promosi secara nasional dan global untuk menarik wisnus dan wisman mutlak diperlukan. Promosi digital yang menyajikan info visual dan program yang menarik merupakan salah satu cara yang efektif untuk menarik wisatawan. Dengan kondisi kehidupan beragama dan sosial budaya di Indonesia, negara ini memiliki modal besar untuk mempromosikan wisata halal pada tataran global.

Buku ini menyajikan pembahasan tentang prospek positif bagi pengembangan pariwisata halal Indonesia. Sikap optimis ini didasari oleh potensi wisata yang dimiliki negara ini yang cukup besar. Namun demikian, secara tiba-tiba pada awal tahun 2020 muncul guncangan (*shock*) tidak terduga, yaitu pandemi Covid-19 yang berdampak negatif sangat nyata pada perekonomian dan memukul keras pengembangan sektor pariwisata global dan nasional.

Berbagai lembaga nasional dan internasional memprediksi ekonomi global dan nasional akan mulai bangkit kembali pada tahun 2021, sejalan dengan terbangunnya perilaku masyarakat pada adaptasi kebiasaan baru di era *new normal* dan ditemukannya obat atau vaksin yang dapat menjadi penawar wabah penyakit ini. Sehubungan dengan itu, sikap optimis bagi pengembangan pariwisata halal di Indonesia

Epilog

harus tetap dipelihara oleh semua pemangku kepentingan, yang diwujudkan dengan tetap mempersiapkan diri untuk menyongsong peluang ekonomi yang besar dari sektor ini pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, September 2020

Editor

Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS

INDEKS

A

akomodasi, 5, 30, 39, 62
aksesibilitas, 41, 48, 66, 74, 87
amenitas, 62, 74, 85

B

big data, 48
bisnis, 2, 5, 19, 47, 72, 83
branding, 45, 95
budaya, 14, 24, 38, 54, 57, 58, 60, 68,
94, 98

C

Campaign (promosi), 14
Certification (sertifikasi), 14
Competitiveness (daya saing), 13
Cooperation (kerja sama), 14
Coordination (koordinasi), 14

D

destinasi, 1, 9, 12, 15, 19, 22, 26, 28,
29, 31, 35, 41, 44, 46, 49, 69, 73,
82
digital, 2, 13, 55, 104

E

efek, 2, 70,

ekonomi, 2, 3, 6, 19, 20, 53, 57, 96,
104
lobal, 20
pariwisata syariah, 15
syariah, 14

F

fasilitas, 4, 11, 29, 30, 36, 46, 65, 85

G

global, 10, 12, 20, 591, 104
Global Muslim Travel Index
(GMTI) 2018, 21, 29

H

halal, 5, 9, 12, 28, 29, 31, 37, 39, 44,
49
haram, 5
hotel, 2, 4, 10, 15, 44, 55, 62, 64, 70,
86, 87, 95
syariah, 4, 10, 29, 36, 65

I

ibadah, 2, 5, 11, 12, 29, 35, 45, 56, 65,
91
Identity (identitas), 12
Indonesia, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 23, 26,
28, 31, 35, 37, 41, 44, 49, 53

indonesia muslim travel index (imti),
23
industri, 3, 5, 12, 14, 15, 87, 93, 98
pariwisata, 19, 41, 43, 53, 59, 73,
95
islamofobia, 12

J

jasa, 3, 4, 13, 14, 28, 30, 43, 87
pariwisata, 15, 93
wisata, 4,

K

Karangasem, 80, 82, 83, 87, 96, 98
konservasi, 47
konsumen, 3, 5, 37, 43, 72, 92, 93
muslim, 39, 44, 92
nonmuslim, 45
pariwisata, 38, 48
konvensional, 37, 39, 47

L

layanan, 4, 24, 29, 31, 36, 55
wisata, 13, 48
logistik, 4

M

makanan, 5, 22, 23, 39, 44, 65, 71, 85,
92
halal, 13, 22, 29, 35, 57, 71, 93
mancanegara, 6, 9, 11, 45, 56
minuman, 13, 23, 39, 92
moslem friendly, 22, 69, 74
Majelis Ulama Indonesia (MUI), 3
muslim, 3, 5, 13, 15, 21, 24, 29, 31, 37,
43, 45, 55, 89, 92

N

nasional, 6
ekonomi, 6, 19, 20
pariwisata, 15, 22, 27, 36, 43, 83
nonmuslim, 12, 13, 21, 44, 45, 49, 98
wisatawan, 12, 13, 23, 45

O

otonomi, 95

P

pandemi covid-19, 2, 13, 14, 20, 21,
59, 83, 104
pasar, 2, 13, 14, 55
wisata halal, 2, 9, 13, 20, 53, 68,
90
pariwisata, 2
global, 2, 11, 59, 83, 104
halal, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 20, 23,
24, 27, 31, 35, 37, 41, 43, 45,
46, 49, 50, 53, 55, 57, 68, 71,
80, 91, 95
syariah, 4, 29, 37, 38, 39, 41
pembiayaan, 13
pendapatan, 22, 31, 54, 60, 96
perspektif agama, 5
perspektif industry, 5
pertumbuhan, 2, 6, 14, 19, 23, 53, 57,
81, 82
positioning, 45, 46
potensi, 2, 6, 11, 13, 19, 28, 31, 49, 54,
55, 60, 62, 66, 74, 79
produsen, 3, 5
promosi, 14, 48, 74, 84, 104
protocol kesehatan, 15
prioritas, 9, 29, 45, 53

R

religi, 23, 80, 84
restoran, 10, 15, 28, 44, 55, 65, 69,
74, 92
ramah, 11, 23, 29, 31, 45

S

sertifikasi, 5, 72
 halal, 5, 14, 30, 46, 65, 71, 72, 92,
 94
smart tourism, 29, 37, 46, 48, 50
strategi, 3, 30, 37, 55
syariah, 3, 5, 10, 13, 37, 54, 65, 71

T

tantangan, 2, 9, 10, 12, 16, 27
Tim Percepatan Pembangunan
 Pariwisata Halal (TP3H), 7
Timur Tengah, 24, 68, 79, 88, 93, 94
teknologi, 37, 46, 48, 49
transportasi, 14, 23, 64, 67, 74

W

wisata, 4, 13, 15, 19, 30, 35, 37, 42,
44, 46, 48, 50, 59, 60, 64
 Islami, 37
 halal (*Islamic tourism*), 7, 10, 12,
 22, 26, 28, 29, 31, 37, 39, 45,
 53, 54, 56, 62, 68, 71
 religi, 4, 23, 80, 84
 syariah, 5, 17, 37, 38
wisatawan, 5, 14, 24, 27, 41, 43, 50,
56, 59, 65, 71, 79, 82
 kunjungan, 52, 82, 84, 87, 96, 98
 mancanegara (wisman), 5, 6, 9,
 35, 57, 80, 87, 90

muslim, 2, 5, 9, 12, 21, 30, 37, 44,
48, 54, 65, 68, 72, 80, 85, 87,
93
nonmuslim, 12, 13, 23, 45
Nusantara (wisnus), 11, 68, 82

Y

yogyakarta, 9, 24, 28, 54, 55, 57, 59,
60, 62, 65, 67, 69, 71, 74

Z

ziarah, 38, 84

TENTANG PENULIS

DEWI WURYANDANI

Penulis menyelesaikan studi S1 pada jurusan Teknik Kimia – Fakultas Teknologi Industri di Universitas UPN “Veteran” Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Keuangan Manajemen Ekonomi-Magister Ekonomi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Penulis bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009, dan saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya dengan kepakaran Kebijakan Ekonomi. Penulis pernah ditugaskan dalam Asistensi pembahasan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Perdagangan, RUU tentang Paten, RUU tentang Kewirausahaan dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun beberapa karya tulis telah diterbitkan diantaranya Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing Melalui Perdagangan Internasional (2015), Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Dalam Mendukung Perekonomian Nasional (2016), Teknologi Disruptif: Tantangan dan Peluang dalam Mendorong Kewirausahaan (2018), Pengembangan kewirausahaan untuk pemberdayaan UKM daerah (2019). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dewi.wuryandani@gmail.com atau dewi.wuryandani@dpr.go.id.

NIKEN PARAMITA PURWANTO

Penulis lahir di Jakarta, 25 Juni 1977. Pendidikan S1 Manajemen diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta tahun 2000, dan Pendidikan S2 Akuntansi diselesaikan di Magister Akuntansi Universitas Indonesia pada tahun 2004. Bekerja sebagai Peneliti bidang

ekonomi dan kebijakan publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI saat ini terlibat aktif dalam penelitian di bidang ekonomi dan kebijakan publik. Penulis dapat dihubungi di niken.paramita@dpr.go.id.

SAHAT ADITUA FANDHITYA SILALAH

Penulis menyelesaikan studi S1 Kimia Teknik, Institut Teknologi Bandung pada tahun 2004. Kemudian memperoleh gelar Magister Administrasi Bisnis (MBA) dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009. Semasa bekerja di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI aktif di Tim Penyusun Naskah Akademik dan RUU (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), RUU Perindustrian, dan RUU Panitia Angket Khusus DPR RI Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II). Beberapa dari tulisan yang telah diterbitkan antara lain: Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan dan Loyalitas Menuju Perbankan Islam (Atlantis Press, Web of Science Indexed, 2019), Isu Strategi dalam Manajemen Badan Usaha Milik Negara (2016), dan Masalah di Manufaktur Industri di Indonesia (2016).

HILMA MEILANI

Penulis menyelesaikan studi S1 Teknik Kimia di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan pendidikan S2 Finance di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti dengan kepakaran Kebijakan Ekonomi. Penulis pernah ditugaskan dalam asistensi pembahasan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, RUU Sistem Resi Gudang, dan RUU Minyak dan Gas Bumi. Saat ini masih terlibat dalam penyusunan RUU Kewirausahaan Nasional. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan antara lain: Fasilitas Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Digital dan *Technopreneur* (2019), Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (2018), Peran

Bank Indonesia dalam Meningkatkan Pembiayaan bagi UMKM (2018), Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Sebelum dan Setelah Implementasi UU No. 28 Tahun 2009 (2017), dan Rasio Efektivitas dan Kontribusi PAD terhadap Belanja dan Investasi Daerah (2016). Penulis dapat dihubungi melalui email: hilma.meilani@dpr.go.id.

DEWI RESTU MANGESWURI

Penulis lahir di Klaten, 6 Mei 1982. Menyelesaikan studi Sarjana dan Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta jurusan Akuntansi. Jabatan saat ini adalah Peneliti Muda di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Pernah ditugaskan sebagai Tim Pemantauan Pelaksanaan UU di DPR RI untuk memantau pelaksanaan UU tentang Perindustrian dan UU tentang Undian. KTI yang pernah dipublikasikan terkait kepakaran yaitu: Upaya Mengatasi Praktik Kartel di Indonesia (Jurnal Kajian, 2019), Kesiapan Pemerintah Daerah Kota Bandung Jawa Barat dalam Memanfaatkan Teknologi Disruptif bagi Pengembangan Ekonomi Wilayah (Buku Tim, 2019), Pengembangan Kewirausahaan melalui Pemanfaatan Strategi Pemasaran yang Tepat (Buku Tim, 2018), Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2016), Peran Lembaga Pengawas dalam Persaingan Usaha (Buku Tim, 2015). Tugas terkait penyusunan Undang-Undang adalah tergabung dalam tim kerja penyusunan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Saat ini masih terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional. Penulis dapat dihubungi di: dewi.mangeswuri@dpr.go.id.

TENTANG EDITOR

Prof. (Riset) Dr. Ir. Achmad Suryana, MS adalah peneliti senior bidang kebijakan pangan dan pertanian, telah menulis lebih dari 140 artikel ilmiah serta semi ilmiah dan editor dari 20 buku serta prosiding. Salah satu buku yang dieditnya berjudul “Memajukan Pariwisata untuk Pengembangan Ekonomi Nasional dan Daerah”, yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI tahun 2019. Pada saat ini Suryana menjadi Ketua Tim Editor jurnal ilmiah Analisis Kebijakan Pertanian (diterbitkan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian, akreditasi peringkat 2); dan sebagai Mitra Bestari tetap dua jurnal ilmiah, yaitu Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan (diterbitkan Kementerian Perdagangan, akreditasi peringkat 2) dan Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (diterbitkan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI, akreditasi peringkat 2).

Achmad Suryana menyelesaikan S1 (Insinyur) dan S2 (Magister Sains) di Institut Pertanian Bogor (IPB). Pendidikan S3 (PhD) dari *North Carolina State University* (NCSU), Amerika Serikat dengan keahlian ekonomi pada tahun 1986. Selain sebagai peneliti, dia pernah menduduki berbagai jabatan struktural di Kementerian Pertanian mulai dari eselon IV sampai eselon I di Kementerian Pertanian. Amanah sebagai pejabat eselon I dipegangnya selama 14 tahun (2000-2014), yaitu sebagai Kepala Badan Urusan Ketahanan Pangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan. Suryana juga menjadi dosen tidak tetap program Magister Sains Agribisnis, Pasca Sarjana IPB. Penghargaan yang pernah diterima oleh Achmad Suryana dari pemerintah antara lain Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Pembangunan. Di kancah

internasional, dia menjadi anggota *Board of Trustees, International Rice Research Institute* (BOT-IRRI) untuk dua periode (2007-2010, 2010-2013) dan menjadi *Chairman Policy Partnership on Food Security, Asia and Pacific Economic Cooperation* (PPFS-APEC) pada tahun 2013. Saat ini Suryana menjadi anggota *Policy Advisory Council, Australia Centre for International Agricultural Research* (PAC-ACIAR) periode 2020-2023.

Achmad Suryana,

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu
Jl. Tentara Pelajar 3B,
Bogor, Jawa Barat.
Email: achsuryana@gmail.com